

Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan Di Aceh: Analisis Data Panel

Busra^{1*}, Yuli Anisah², Yeni Irawan³, Syaripuddi⁴

^{1,2,3}Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

⁴Fakultas ekonomi, Universitas Gajah Putih, Takengon

¹busra@pnl.ac.id (penulis koresponden)*

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Aceh, variabel yang diuji adalah adana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DAK) terhadap kemiskinan di Aceh. Dari sisi anggaran pemerintah, Aceh mendapatkan limpahan fiskal yang besar karena otonomi khusus, tetapi angka kemiskinan masih tetap tinggi, bahkan termasuk kedalam provinsi termiskin di Sumatra setelah Bengkulu. Hal ini kontradiktif dengan banyaknya anggaran yang diterima, seharusnya limpahan anggaran harus sejalan dengan pengurangan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan kabupaten Aceh pada 23 kabupaten kota. Dengan menggunakan analisis data panel diperoleh hasil bahwa variabel yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Akan tetapi pengaruh yang diberikan relatif kecil.

Kata kunci— Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus, Data panel, FEM, kemiskinan

Abstract— This study aims to analyze the variable fiscal decentralization on poverty in Aceh, the variables tested are the general allocation (DAU) and the Revenue Sharing Fund (DAK) on poverty in Aceh. From the government budget perspective, Aceh received a large fiscal flow due to special autonomy, but the poverty rate remains high, even among the poorest provinces in Sumatra after Bengkulu. This contradicts the large amount of budget received, the spillover of the budget should be in line with poverty reduction. This research was conducted in Aceh district in 23 urban districts. By using panel data analysis, it is found that the tested variables have a significant effect in reducing the poverty rate in Aceh. However, the effect is relatively small.

Keywords— General Allocation Fund, Special Allocation, Panel data, FEM, Poverty

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi, khusus untuk provinsi Aceh memiliki perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus berupa tambahan dana transfer yang sebanding dengan 2 persen dari alokasi DAU nasional untuk 15 tahun mulai tahun 2008 dan 1 persen untuk lima tahun berikutnya setelah masa 15 tahun berlalu.

Dengan dimulainya penerimaan dana otonomi khusus (otsus) pada tahun 2008, Aceh memperoleh tambahan sumber daya fiskal secara signifikan. Dana Otsus memiliki peran menggantikan dana bagi hasil migas yang jumlahnya terus menurun semenjak 2008. Penerimaan dana otonomi khusus telah membuat Aceh menjadi salah satu provinsi dengan sumber daya fiskal terbesar di Indonesia.

Pemanfaatan Dana Otonomi khusus sebagaimana diatur dalam uu no 11 tahun 2006, untuk: (i) Membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (ii) Pemberdayaan ekonomi rakyat; (iii) Pengentasan kemiskinan; dan (iv) Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan dana otonomi khusus yang sangat besar, maka provinsi aceh diharapkan akan mampu membangun baik fisik maupun sumberdaya manusia dengan sangat baik.

Secara logis, dana otonomi khusus memberikan kesempatan bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut melalui program prioritas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Limpahan dana otonomi khusus yang sedemikian besarnya bagi Aceh seakan menjadi *booster* atau pendorong kuat demi mengejar ketertinggalan pembangunan akibat konflik dan bencana.

Namun, kenyataan yang hadir di Aceh saat ini menunjukkan tanda-tanda bahwa pembangunan yang diprioritaskan dalam pesan undang-undang justru kurang berhasil menyerap dana otonomi khusus secara maksimal. Menarik untuk dianalisis bagaimana dampak desentralisasi fiskal yang ditandai dengan dana otsus dan dana bagi hasil.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dialami, meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan. Paling kurang ada tiga indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, pertama, pertumbuhan output, kedua, pertumbuhan output tenaga kerja, dan ketiga, pertumbuhan output perkapita. [1]. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi, alokasi dana pembangunan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan adanya tambahan fiskal. Secara definitif, kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran dan belanja negara [2]. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa paling sedikit terdapat tiga fungsi utama kebijakan anggaran dan belanja negara (daerah). Fungsi utama adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi [3]. Desentralisasi dapat dilihat dalam berbagai dimensi, terutama menyangkut aspek fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. [4] menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan dan kebijakan tentang pembangunan daerah. Desentralisasi adalah diteruskannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah. Sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.

Dalam era disentralisasi atau otonomi daerah yang mendapat otonomi khusus mendapatkan tambahan fiskal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri dari tiga jenis (1) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (DBH); (2) Dana alokasi umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang selalu nyata dalam sebuah masyarakat dan merupakan masalah dalam sebuah pembangunan. Ditandai dengan keterbelakangan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi dan ketidakberdayaan [5]. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Kemiskinan didefinisikan sebagai standar kehidupan yang rendah, [6]. Yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin,[7].

Terdapat dua teori yang sering digunakan dalam memahami kemiskinan adalah teori neo-liberal dan teori sosial demokrat, [8]. Teori neo-liberal menyatakan komponen utama masyarakat dalam ekonomi adalah kebebasan individu. Dalam teori neo-liberal, beranggapan kemiskinan merupakan persoalan individu. Penyebab kemiskinan sangatlah kompleks, tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, kemiskinan dapat dikategorikan kemiskinan karena sebab-sebab alami, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural [9]. Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam. Ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama dalam perekonomian. Keterbatasan sumber daya alam yang tersedia menyebabkan sektor ekonomi tidak bekerja secara optimal.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan yang tidak menguntungkan penduduk miskin [10]. Kemiskinan struktural diduga disebabkan kebijakan pemerintah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Metode Kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk menjelaskan dampak beberapa variabel penelitian. Analisis regresi digunakan untuk melihat dan menganalisis pengaruh desentralisasi yang diwakili oleh variabel DAU dan DAK terhadap kemiskinan di Aceh. Model persamaan umum penelitian.

$$Poverty_i = \alpha - \beta_{1i} DAK_i + \beta_{2i} DAU_i + e_i \quad (1)$$

Dimana :

Poverty adalah kemiskinan

β_1 adalah koefisien variabel

DAU adalah dana alokasi umum

DAK adalah dana alokasi khusus

i adalah kabupaten kota

e adalah error term

Selanjutnya, akan dilakukan pemilihan model analisis yang akan dilakukan apakah menggunakan PLS, Fixed effect (FE) atau Random effect (RE). Untuk itu perlu dilakukan uji F dan uji Hausman untuk memastikan penggunaan model yang tepat.

$$F = \frac{(R_{fs}^2 - R_{pls}^2)/m}{(1 - R_{pls}^2)/(n - k)} \quad (2)$$

m adalah restricted variabel

n adalah jumlah sampel

k adalah jumlah variabel penjelas

Hipotesis nol dari restricted variabel penjelas

H_0 = model pooled least square (PLS) (Restricted)

H_1 = Model Fixed effect (Unrestricted)

A. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memastikan model yang digunakan memenuhi kriteria BLUE maka akan dilakukan uji asumsi klasik terhadap model, yaitu uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Multijolinieritas.

B. Pengujian Kriteria Statistik

Penelitian ini menggunakan uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), dan pengujian koefisien determinasi (uji- R^2).

C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel Poverty dengan DAU

$H_1 : \beta_1 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel Poverty dengan DAU.

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel Poverty dengan DAK

$H_1 : \beta_1 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel Poverty dengan DAK.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. jika t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c.

Untuk Menguji apakah variabel sacera bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen maka akan dilakukan uji F

Uji koefisien seterminasi (R^2) dilakukan untuk mengukur kemampuan regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Semakin besar nilai R^2 maka semakin baik. Artinya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat semakin kuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Makro Ekonomi Aceh

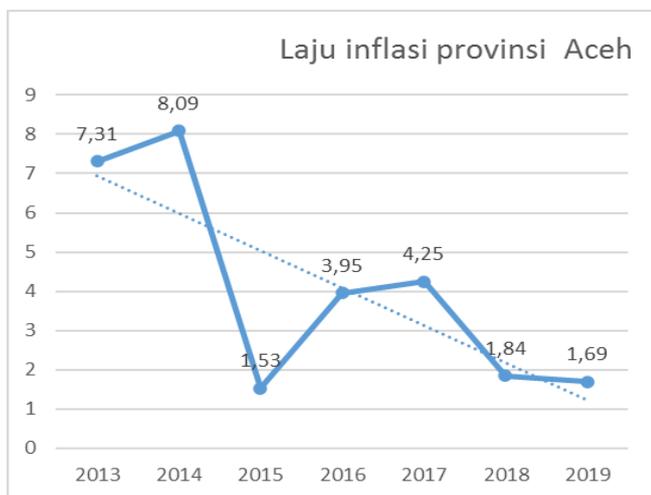
Kondisi pendapatan daerah brutto dilihat dari sumbangan sektor ekonomi masih didominasi oleh konsumsi rumah

tangga, sumbangan dari sektor luar negeri masih relatif kecil sedang kan net ekspor antar daerah masih negatif. Suatu perekonomian seharusnya dibangun dengan sumbangan sektor perdagangan laur negeri dan perdagangan regioanal, tetapi hal ini masih belum memberikan hasil yang memadai.



Gambar 1. PDRB berdasarkan sumbangan sektor 2019

Dilihat dari laju inflasi, tingkat laju inflasi mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai 2019. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 laju inflasi terus mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa laju infalsi di Aceh masih terkendali.



Gambar 2. Laju inflasi Aceh 2013-2019

Meskipun laju inflasi terkendali, tetapi pemerintah aceh masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan, Aceh masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi masih barada diatas rata-rata nasioanal. Untuk tingkat sumatra, prosesntasi kemiskinan diAceh masih berada diurutan kedua setelah bengkulu. Beberapa daerah, seperti Aceh Utara, Aceh Singkil masih menempatkan diri pada urutan tertinggi dalam jumlah penduduk miskin.

Tingginya angka kemiskinan di Aceh, tentu tidak sejalan dengan besarnya dana untuk pembangunan, yang bersumber dari dana otonomi. Ini mengindikasikan banyak hal, mulai dari perencanaan sampai pada proses pengelolaan dana pembangunan yang masih belum tepat.



Gambar 3. prosentase penduduk miskin di Aceh.

Tingginya angka kemiskinan di Aceh, tentu tidak sejalan dengan besarnya dana untuk pembangunan, yang bersumber dari dana otonomi. Ini mengindikasikan banyak hal, mulai dari perencanaan sampai pada proses pengelolaan dana pembangunan yang masih belum tepat.

B. Analisis Data Panel

Bagian ini akan membahas temuan empiris berdasarkan hasil uji data dengan menggunakan eviews. Analisis data panel menguji pengaruh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Aloakasi khusus terhadap kemiskinan diAceh. Pengujian dengan data panel dapat dilakukan dengan beberapa model pengujian, random effect, fixe effect dan PLS Untuk menentukan model mana dari ketiga model ini yang terbaik, dapat dilakukan dengan uji Hausman test. Hipotesis pada uji Hausman di tentukan dengan melihat nilai probabilitas Cross Section Random, nilai probabilitas sebesar 0,0000 berarti model Fixe Effect adalah model yang terbaik.

TABEL 1. HASIL UJI HAUSMAN TEST

Test Summary	Chi-Sq. Statistic			
	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	65.028963	2	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG_DAU?	0.052522	0.089056	0.000023	0.0000
LOG_DAK?	-0.008406	-0.006980	0.000000	0.0000

Model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu [11]. Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy [12]. Model ini sering disebut dengan model Least Square Dummy Variables (LSDV).

Hasil uji model dengan fixe effect diperoleh bahwa variabel yang diuji yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menunjukkan hasil yang signifikan, sebagaimana tabel 2 berikut.

TABEL 2.
HASIL UJI FIVE EFECT MODEL

Variabel	Coefficient	t - statistik	probabilitas
C	4.478181	17.17590	0.0000
L_DAU?	-0.009386	-1.418559	0.0985
L_DAK?	-0.010117	-1.791126	0.0766
R-squared		0.998453	
Adjusted R-squared		0.998041	
S.E. of regression		0.012589	
Sum squared resid		0.014264	
Log likelihood		354.0308	
F-statistic		2420.602	
Prob(F-statistic)		0.000000	

Model persamaan untuk uji fixe model diatas adalah :

$$Poverty = 4.478181 - 0.009386 L_DAU - 0.010117 L_DAK$$

Hubungan antara kemiskinan dengan besarnya dana otonomi memil hubungan terbalik, jika dana otonomi semakin besar akan menurunkan angka kemiskinan. Namun, penurunan angka kemiskinan relatif kecil sehinggal pengentasan kemiskinan menjadi lambat. Setiap tambahan dana DAU dan DAK sebesar satu persen hanya akan menurunkan angka kemiskinan dibawah 0,01 persen. Sejak dari tahun 2005 -2019 jika kita bandingkan dengan data statistik, penurunan angka kemiskinan di Aceh memang sangat kecil

Dilihat dari besarnya pengaruh atau kemampuan variabel prediktor secara simultan dalam menjelaskan variabel response sangat kuat yaitu sebesar 89 persen. Sementara 11 persen lainnya dipenagaruhi oleh variabel lain. Dan secara simultan semua variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel model yang baik untuk digunakan dalam menguji dampak otonomi khusus adalah Fixe effect model (FEM) berdasarkan nilai uji Hausman. Dari hasil uji data panel, terlihat bahwa dana otonomi yaitu DAU dan DAK memiliki pengaruh dalam penurunan angka kemiskinan, namun dampaknya relatif kecil. Dampak yang kecil ini juga terlihat jika dibandingkan dengan data statistik, penurunan kemiskinan aceh sangat kecil dari tahun ke tahun.

REFERENSI

[1] Todaro, dan Smith (2006). *Development Economic*, Printice Hill, New York.
 [2] Kurniawan, Munandar, dan Santoso, F. (2012). *Mencari Hubungan Antara Kebijakan Moneter dengan Kemiskinan dan ketimpangan Pendapatan: kajian Menggunakan Data regional Indonesia*, penerbit Bank Indonesia.
 [3] Muallim, Mus, (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan*

[4] Gozali, Imam.(2010), *Aplikasi Analisis Multipariat dengan Program SPSS*, badan , Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang.
 [5]. Fiszbein, Ariel. *at.al.* (2014). *Social Protection and Poverty Reduction: Global and Some Target. World Development* , vol, 61. pp, 167-177.
 [6]. Alkire, Sabina and Santos, M. Emma. (2014). *Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. World Development* .vol 59, pp. 251-274.
 [7]. Liyanage Devangi H. Perera, and Grace, H.Y. Lee. (2013). *Have Economic Growth And Institutional Quality Contributed To Poverty And Inequality Reduction In Asia?. Journal Of Asian Economic* ,vol 27, pp.71-86.
 [8] Cheyne, C., O'Brien, M., & Belgrave, C. (1997). *Social policy in Aotearoa New Zealand*. Auckland, New Zealand: Oxford University Press.
 [9]. Nzunuri, Msafiri Thadeo.(2011) *The Role Of Income Generating Groups In Poverty Reduction In Kigoma District, Tanzania*, Disertasi. <http://suaire.suanet.ac.tz>
 [10] Rejekiingsih, T. W. (2011). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskina Kota. Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 12 (1), 28-44.
 [11] Gujarati, D,N (2004), *Basic Econometric*, New York, Mc Graw-Hill
 [12]. Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jogjakarta: BPFE-UGM